

Bahasa Dan Politik Islam
Gerak dan Perilaku Diskursif Politisasi Islam Pihak Oposisi
dalam Pemilu 2019 di Indonesia dalam Konteks Politik Bahasa

M. Suyudi

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email: alkiso57@gmail.com

Wahyu Hanafi Putra

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email: wahyuhanafiputra@gmail.com

Abstract: *The aims of this study is to describe the role of language in achieving power before 2019 electoral democracy, which is used and played by the Indonesian political elite. This study also aims to provide confirmation that political language in the post-truth era contains semantic derogation that does not reflect political courtesy. The method used in this research is descriptive-qualitative. Orwell (1950) considers that language can be used to influence and change political ideologies that can change the way people think. The results of this study are, the languages used by political elites in the 2019 electoral political contestation turned out to contain semantic derogation that did not have political politeness. It can be exemplified when campaigns, mass mobilizations, and demonstrations conducted by certain mass organizations before the 2019 electoral democracy party. The use of verbal language with expressions of hatred, hoaxes, and negative diction will have an impact on social divisions. In addition, the use of non-verbal language such as the rise of posters, memes, and negative hashtags that contain provocation and enliven social media Facebook, Twitter, and Instagram now also quickly give effect to unhealthy political communication. In addition, the existence of religious populism narrated in the political language of Islam is increasingly disrupting national stability. As a result, the community*

becomes material objects that are easily provoked and confronted with negative language narratives. So if the language is narrated with negative biases like what Orwell (1950) said. Language will bring people to a bad party for democracy. The solution is for the community not to stutter in speaking languages ahead of 2019 electoral democracy. Use positive languages to attract public sympathy. Society needs to look for evidence before believing negative news, so that the ideology of the community is not easily held hostage because of the interests of certain groups.

الملخص: تهدف هذه الدراسة لبيان دور اللغة التي لعب السياسيون الإندونيسيون لنيل القوة عند ما استقبلت فيها الديمقراطي الانتخابي 2019 بإندونيسيا. وكذا تهدف هذه الدراسة لبيان دور اللغة السياسية فيما بعد الحقيقة التي فيها عدم التقييد الدلالي فإنه مخالف لأدب السياسة. وكان توتير الوطني وانقسام المجتمع ومظاهرهم المناسبة بالتاريخ 22 من مايو 2019 م في إدارة الانتخاب العامي فهي من أحد المأثورات اللغوية السياسية التي تحدّثها السياسيون الإندونيسيون فيها. وأما طريقة البحث المستعملة بهذه الدراسة البحث الواقعي. رأى أوروبيل (1950) أن اللغة متأثرة للإنسان دورها وتطبيقها في رأي السياسة بتغيير الفكر لنفسه. فالحاصلات في هذه الدراسة أن اللغات التي تحدّثها السياسيون الإندونيسيون في مسابقة السياسة 2019 بإندونيسيا فإنها مخالفة لأدب السياسة. ومن أمثلتها تطبيق حملة الحزب وتعبئة المجتمع ومظاهرهم عند ما استقبلت فيها حفلة الديمقراطي. استعملت اللغة الظاهرة بإلقاء المكروهات السالبة تورث إلى انقسام المجتمع تغييرهم. وكذا دور اللغة غير الظاهرة كصور السياسة وميمي وعلامات التصنيف السالبة التي فيها استفزاز الوسائل العامة *facebook, twitter, instagram* مأثورة الإتصال السياسية. وكذا شعبية الدين التي طبّقها لغة السياسة متغيرة لتوتير الوطني ثم تجرى بأثر الأمور كتركيز المجتمع في الكاتبة المادية الذين ينمون بإلقاء اللغات السالبة. دلت اللغة السالبة كما قالها أوروبيل (1950) أن دورها تورث إلى الديمقراطي الخطيئة. ومن محارجها صدوق المجتمع في التحدّث لاسيما في حفلة

الديمقراطي 2019. عليهم أي جمهورية الإندونيسيا أن يتفوقوا الأحكام الشائعة في هذا البلد بدون تفريق المجتمع. استعمل اللغة الجيدة الإيجابية لنيل تعاطف المجتمع. يحتاج المجتمع إلى دليل ظاهر قبل تيقن الأخبار العامة السالبة حتى لا يدرك تضاد أفكار السياسة فيها واتباعهم بأهمية المجموعة الخاصة.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran bahasa yang dimainkan oleh para elit politik Indonesia guna meraih kekuasaan menjelang demokrasi elektoral 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan konfirmasi bahwa bahasa politik di era post-truth yang mengandung derogasi semantik sangat tidak mencerminkan kesopanan politik (Political Correctness). Adanya ketegangan nasional, perpecahan masyarakat serta demonstrasi masa pada tanggal 22 Mei 2019 di gedung KPU dan Bawaslu merupakan salah satu dampak dari narasi bahasa politik negatif yang diujarkan oleh elit politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Orwell (1950) memandang bahwa bahasa bisa digunakan untuk mempengaruhi dan mengubah ideologi politik yang dapat merubah cara berpikir orang lain. Hasil penelitian ini adalah, bahasa-bahasa yang digunakan oleh para elit politik dalam kontesatasi politik elektoral 2019 ternyata mengandung derogasi semantik yang tidak memiliki kesopanan politik. Dapat dicontohkan ketika kampanye, mobilisasi masa, dan demonstrasi yang dilakukan oleh ormas tertentu menjelang pesta demokrasi elektoral 2019. Penggunaan bahasa verbal dengan ujaran kebencian, hoaks, dan diksi negatif akan memberi dampak terhadap perpecahan masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa non-verbal seperti maraknya poster, meme, dan tagar-tagar negatif yang mengandung provokasi dan meramaikan media sosial facebook, twitter, serta instagram kini juga cepat memberikan efek komunikasi politik yang kurang sehat. Selain itu, eksistensi populisme agama yang dinarasikan dengan bahasa politik Islam kian mengganggu kesetabilan nasional. Dampaknya, masyarakat menjadi objek material yang mudah diprovokasi dan diadu domba dengan narasi-narasi bahasa negatif. Demikian jika bahasa dinarasikan dengan bias-bias negatif seperti apa yang dikatakan Orwell (1950). Bahasa akan membawa masyarakat menuju pesta demokrasi yang buruk.

Solusinya adalah, pemerintah harus tegas dalam menjalankan hukum disaat menangani kasuistik politik 2019 di Indonesia tanpa adanya diskriminasi. masyarakat untuk tidak gagap dalam mengujarkan bahasa menjelang demokrasi elektoral 2019. Gunakan bahasa-bahasa positif untuk menarik simpati masyarakat. Masyarakat perlu mencari bukti sebelum meyakini berita-berita negatif, sehingga ideologi masyarakat tidak mudah tersandera karena kepentingan kelompok tertentu.

Kata kunci; Bahasa, Politik, Islam, Demokrasi, Pemilihan, 2019

PENDAHULUAN

Bahasa dan politik, adalah dua term yang saling bersinergi dalam fenomena sosial terlebih perhelatan politik. Kunci keberhasilan konstestasi politik tidak dipungkiri berawal dari bahasa. Sebagai sistem yang *arbriter*, bahasa mampu memberi ruang strategis terhadap hidup matinya kontestasi politik di Indonesia. Fenomena empiris yang dapat didiskusikan dalam masalah ini adalah tampilnya para elit politik untuk berkomunikasi secara verbal non-verbal di tengah memanasnya panggung politik di tahun 2019 di Indonesia. Pemilu di tahun 2019 ini merupakan politik pertama kali yang dilakukan secara serentak agar meminimalkan konflik antar partai pendukung.¹ Namun upaya yang dilakukan pemerintah ini tidak memutus mata rantai konflik dalam tubuh pemilu sendiri, mulai dari pertikaian partai, konfrontasi, dan gerakan-gerakan anarkis sebagai dampak akan diselenggarakannya pemilu.

Dari pihak oposisi, dramatisasi percaturan politik tahun 2019 di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi seluruh elemen. Adanya ketegangan nasional, perpecahan masyarakat serta demonstrasi masa pada tanggal 22 Mei 2019 di gedung KPU dan Bawaslu merupakan salah satu dampak dari narasi bahasa politik negatif yang diujarkan oleh elit politik. Belum lagi memanasnya suasana para pendukung partai dan figur menjelang pemilihan presiden kian menyulut ketegangan sosial dan konflik eksternal yang semuanya bermuara dengan bahasa.

¹ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (October 9, 2018): 73, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

Isu-isu perdebatan politik yang digaungkan tidak lebih daripada penekanan bahasa persuasif. Kini asas politik kebebasan tidak sebatas pada wacana yang hanya terkukung dalam ideologi praktis, namun hadirnya kian merambah pada realitas politik modern di Indonesia.

Pandangan peneliti pada pihak opisis mengenai berbagai kasus-kasus yang lain adalah ketika kampanye, mobilisasi masa, dan demonstrasi yang dilakukan oleh ormas tertentu saat menyambut pesta demokrasi elektoral 2019. Penggunaan bahasa verbal dengan ujaran kebencian, hoaks, dan diksi negatif telah memberi dampak terhadap perpecahan masyarakat.²

Kasus-kasus bahasa virtual yang hangat dan menyelimuti pesta demokrasi elektoral 2019 di Indonesia tidak lepas dari afiliasi gerakan sosial, partai politik, organisasi Islam, ideologi, dan populisme agama. Kasus-kasus ini muncul sembari berkembangnya teknologi komunikasi. Dimana ruang informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang melek digital. Dari sudut partai politik, terdapat partai-partai politik berafiliasi Islam konservatif yang mempengaruhi gerakan-gerakan ini, sebut saja PKS dan PAN. Kedua partai ini yang banyak memotori gerakan-gerakan politik Islam pada tahun 2019. Fundamentalisme PKS lahir dari gerakan Tarbiyah yang memiliki latar belakang sosio-historis Muhammad Natsir dan Transnasionalisme Ihwanul Muslimin, sedangkan PAN merupakan partai yang berbasis Islam modernis identik berafiliasi Muhammadiyah.³

Perkawinan antara politik dan legitimasi Islam sebagai agama normatif dalam kasus-kasus demokrasi 2019 demikian sangat kental dan menyelimuti atmosfer keberagaman masyarakat Indonesia. Wacana ini sebenarnya masalah klasik pasca reformasi 1998, dimana agama dan negara yang kemudian

² Wahyu Hanafi Putra and Dawam M Rohmatulloh, "Bahasa Dan Narasi Politik Kreatif; Kontestasi Merebut Kebenaran Islam Dalam Demokrasi Digital 2019 Di Indonesia," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 3, 2019, 294–302.

³ Galang Gerald, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS," *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019): 135–57.

berkembang dengan diskursus agama dan politik telah mewarnai pesta demokrasi di Indonesia dengan hadirnya partai-partai berlabel agama.⁴

Perhelatan politik 2019 di Indonesia seolah-olah menyandera peran bahasa sebagai kunci keberhasilan meraih kekuasaan di negeri ini. Bagaimana tidak, kedua pasangan capres dan cawapres ini mendapat stereotip yang menonjolkan aktivitas politik identitas.⁵ Bahasa menjadi sebuah kekuatan yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan khusus. Penggunaan bahasa secara superintensif, termasuk penyalahgunaan bahasa dengan berbagai kompleksitasnya sangat menonjol dalam dunia politik terlebih di Indonesia.⁶ Perihal ini yang kemudian mengundang berbagai macam reaksi konflik, perilaku diskursif terutama dalam ujaran-ujaran yang menyandera peran bahasa. Bahasa politik persuasif yang mengandung derogasi semantik sangat tidak mencerminkan kesopanan politik (*political correctness*). Inilah yang terjadi di tahun saat menyambut demokrasi elektoral 2019. Batasan penggunaan bahasa tidak lagi memenuhi etika berbahasa dan tindak tutur. Para konstestan dan elit politik kini telah melampaui garis-garis normativitas penggunaan bahasa. Bahasa ibarat bias perebut kekuasaan yang harus diberlangsungkan.

Sastrawan Inggris Orwell (1950) memandang bahwa bahasa bisa digunakan untuk mempengaruhi dan mengubah ideologi politik yang dapat mengubah cara berpikir orang lain.⁷ Politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, pengambilan kebijakan, alokasi, dan distribusi, maka dibutuhkan politik bahasa demi meraih tahta tertinggi. Bahasa dapat dijadikan agenda kebijakan dan sasaran kajian politik sehingga politik menjadi subjek dan bahasa menjadi objek; dan pada pihak lain tuturan politik dan perilaku verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian kebahasaan sehingga di sini politik menjadi objek dan bahasa menjadi subjek. Yang pertama dapat disebut

⁴ Agus Saputro, "AGAMA DAN NEGARA : POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019," *ASKETIK* 2, no. 2 (December 25, 2018): 111–20, <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>.

⁵ Saputro.

⁶ Rofiatull Andawiyah, "BAHASA, KOMUNIKASI POLITIK DAN IDEOLOGI," *OKARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 10, no. 2 (November 30, 2016): 159, <https://doi.org/10.19105/ojbs.v10i2.1086>.

⁷ Wareing S Thomas L, *Bahasa, Masyarakat, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

politik bahasa (*language politics*), sedang yang kedua dapat disebut bahasa politik (*political language, linguistics of power*).⁸

Bahasa dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Politikus harus menemukan cara-cara agar dapat mempengaruhi masyarakat dan mereka seringkali menggunakan aspek retorika (seni berbicara) dari bahasa untuk mencapai tujuan itu.⁹ Bahasa sebagai pengendali pikiran dan kesopanan politik (*political correctness*) dapat digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang dapat mengubah persepsi orang lain. Dengan mengendalikan pemikiran orang lain dapat berarti mengubah cara pandang/paradigma orang lain.¹⁰ Senada dengan terminologi demikian, bahasa harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan bahasa politik sebagai alat komunikasi bertujuan untuk membujuk atau merayu khalayak. Bahasa politik penuh dengan semboyan-semboyan dan kata-kata bersayap serta menghindari penggunaan bahasa yang berkonotasi netral dan objektif.¹¹ Bahasa ini yang kemudian melahirkan tindak tutur bahasa politik yang memiliki distorsi dengan ujaran lebih sopan atau dengan istilah lain eufemisme bahasa politik.¹²

Hadirnya bahasa di tengah perhelatan politik demikian akan membawa arus resolusi konflik antara bahasa dan politik. Narasi-narasi bahasa dengan berbagai sistemnya di tengah pesta demokrasi elektoral 2019 di Indonesia telah menyeret bahasa ke wilayah etnografi komunikasi. Bagaimana tidak? Kontestasi panggung politik yang dimainkan elit politik di masa itu relatif menggunakan bahasa persuasif yang mengandung derogasi semantik. Penggunaan bahasa demikian untuk mendapatkan simpati, perhatian, dan persepsi masyarakat untuk menentukan pilihan masing-masing.¹³ Dampaknya adalah masyarakat menjadi objek material yang mudah diprovokasi dan diadu domba dengan narasi-narasi bahasa negatif. Pemikiran masyarakat mudah berubah sebab bias komunikasi.

⁸ Fahrurrozi, *Bahasa Indonesia; Catatan Mengenai Kebijakan Bahasa, Kaidah Ejaan, Pembelajaran Sastra, Penerjemahan, Dan BIPA* (Yogyakarta: Garudawacana, 2016).

⁹ Fahrurrozi.

¹⁰ Thomas L, *Bahasa, Masyarakat, Dan Kekuasaan*.

¹¹ Santoso Anang, *Bahasa Politik Pasca Orde Baru* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003).

¹² Moh Rosyid, "Kekuatan Makna Bahasa Dalam Politik Konspirasi," *Arabia* 6, no. 1 (2014).

¹³ Sitti Rabiah, "Ragam Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Politik," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2017): 121–31.

Maka bagaimana kajian lebih mendalam terkait hal ini? Akan dibedah dalam pembahasan di sub tema berikut.

Diskusi kegelisahan akademik demikian membawa peneliti untuk merumuskan sebuah tujuan penelitian. Bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan peran bahasa yang dimainkan oleh para elit politik Indonesia guna meraih kekuasaan menjelang demokrasi elektoral 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan konfirmasi bahwa bahasa politik di era post-truth yang mengandung derogasi semantik sangat tidak mencerminkan kesopanan politik (*Political Correctness*). Dua tujuan penelitian ini merupakan tujuan pembahasan yang cukup signifikan untuk dikaji tahap berikutnya. Kedua tujuan penelitian ini juga tidak lepas dari distorsi politik elektoral yang sedang terjadi di Indonesia pada tahun yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*causal study*). Data yang diperoleh adalah dari berbagai kasus konflik tahun politik 2019 di Indonesia yang disebabkan oleh bahasa dan komunikasi politik. Secara deskriptif, data primer terkait penggunaan bahasa verbal diambil dari kasus demonstrasi masa pada tanggal 22 Mei 2019 di gedung KPU dan Bawaslu. Kemudian, dari data bahasa non-verbal peneliti ambil dari narasi-narasi politik dari media sosial facebook, twitter, serta instagram. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yakni peneliti berusaha mengklasifikasikan data berdasarkan kelompok dan kluster yang telah ditentukan untuk dilakukan tahap lebih lanjut yakni analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan; mengidentifikasi data-data bahasa politik, mengklasifikasi data-data bahasa politik sesuai dengan jenis bentuk, menganalisis data-data bahasa politik dengan teori politik bahasa, dan memaparkan hasil penelitian secara sistematis dan lengkap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Bahasa & Bahasa Politik; Epistemologi Dialogis-Kontributif

Politik dan bahasa adalah dua istilah yang sering dihubungkan. Dua istilah ini dapat dilihat dalam dua macam hubungan. *Pertama*, hubungan koordinatif atau

sejajar antara politik dan bahasa. Di sini politik dan bahasa berinteraksi, saling mempengaruhi, dan tarik-menarik secara setara. Keduanya saling berpengaruh dan berkontribusi karena keduanya menjadi subjek. *Kedua*, hubungan subordinatif atau saling membawahkan antara politik dan bahasa. Di sini, salah satu menjadi subjek dan yang lain menjadi objek. Pada satu pihak, bahasa dapat menjadi agenda kebijakan dan sasaran kajian politik, sehingga di sini politik menjadi subjek dan bahasa menjadi objek, dan pada pihak lain tuturan politik dan perilaku verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian kebahasaan sehingga di sini politik menjadi objek dan bahasa menjadi subjek. Yang pertama dapat disebut dengan politik bahasa (*language politics*), sedangkan yang kedua dapat disebut bahasa politik (*political language, linguistics of power*).¹⁴

Sejalan dengan itu, bisa dikatakan bahwa politik bahasa menunjuk pada kenyataan-kenyataan dimana keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan bahasa diperpolitikkan dan keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan politik dituangkan, disuarakan, dan diungkapkan dalam ungkapan atau idiom kebahasaan.¹⁵ Politik bahasa bukanlah berbicara masalah kebahasaan/linguistik dari berbagai sudut pandang baik fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Akan tetapi wacana politik bahasa dirasa lebih kompleks daripada persoalan linguistik semata. Agenda politik bahasa lebih mengarah kepada pergulatan kebijakan dan pencarian eksistensi bahasa di ruang publik guna mendapatkan wilayah tertentu demi menjunjung nilai register bahasa menjadi lebih baik.¹⁶

Politik bahasa dapat memuat kepentingan individu maupun kelompok pada waktu-waktu tertentu, terlebih di tahun politik. Merupakan media spesifik guna merevitalisasi isu-isu sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Dengannya, pembentukan isu dan opini publik akan mudah didapat.

¹⁴ Maslathif Purnomo, "Politik Bahasa Di Tengah Kemajemukan Masyarakat," 2019, <https://pakarlinguistik.wordpress.com/2010/03/10/politik-bahasa-ditengah-kemajemukan-budaya-bangsa/>.

¹⁵ Purnomo.

¹⁶ Wahyu Hanafi Putra and Rizki Amalia Sholihah, "Politik Bahasa Asing Dan Hegemoni Pesantren Di Nusantara," *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 1, no. 1 (April 4, 2020): 43–53, <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v1i1.320>.

Terlebih di era virtual dan digital yang sangat mudah mengakses media sosial. Melalui kanal-kanal yang dibentuk sekreatif mungkin, akan memberi celah terhadap kuatnya politik bahasa.

Populisme Agama; Cermin Politik di Era Post-Truth

Berjalannya agama dan politik yang semakin hari kian tiada jurang pemisah dan berdampak pada sikap politik post-truth. Dimana segala bentuk kebijakan politik akan berada dibawah bayang-bayang agama sebagai sumber kebenaran. Dinamika politik di masa post-truth, fakta dan kebenaran bukanlah hal yang penting, tetapi emosionalitas dan reproduksi informasi secara berulang-ulang melalui media sosial lah yang dianggap benar.¹⁷

Post-truth sebagai situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang objektif.¹⁸ Hal ini senada dengan apa yang pernah dikatakan J.L. Austin (1960), bahwa segala hal yang dibicarakan manusia dan dapat mempengaruhi persepsi dan keyakinan pribadi seorang maka tidak lepas dari tindak tutur perlokusi.¹⁹ Bahasa dan politik post-truth yang berawal dari emosional pribadi dan diujarkan dengan verbalisme komunikasi, akan memberi efek komunikasi emosional tanpa sadar dan berada di luar kebijakan politik yang diinginkan. Bagaimana narasi populisme politik post-truth yang berteduh di bawah naungan populisme agama? Sepertinya ini yang menjadi perdebatan dalam menyambut pesta demokrasi elektoral 2019 di Indonesia. Dimana suhu politik menjadi hangat disertai dengan populisme agama.

Jika populisme agama yang dihegemoni dan legitimasi isu-isu populis terus berkembang dan berjalan dalam tubuh demokrasi, maka menciptakan iklim demokrasi elektoral yang kompetitif tidak akan pernah tercapai. Populisme agama ini yang marak di era post-truth dan menghambat proses demokrasi warga negara

¹⁷ Yasir Alimi, *Meditasi Agama Post-Truth* (Yogyakarta: LKiS, 2018).

¹⁸ Gun gun Heriyanto, *Panggung Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019).

¹⁹ Cummings Louise, *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Indonesia.²⁰ Politik Islam post-truth yang terjadi di Indonesia menjelang tahun politik 2019 tidak bisa lepas dari peristiwa 411 dan 212 yang menjadi bukti nyata menguatnya solidaritas muslim di Jakarta bahkan di berbagai daerah guna merespon isu penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok.²¹ Dari tuntunan penegakkan hukum melebar menjadi lahan politik praktis untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang keharaman pemimpin non muslim dalam Islam yang wacananya digulirkan dalam aksi tersebut. Belajar dari kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan politisasi agama, tahun 2018-2019 sangat berpotensi bagi pihak-pihak tertentu untuk menyulut isu etnisitas dan agama. Instrumentalisasi agama maupun tokoh agama dalam perpolitikan mulai terjadi pada politik tahun ini. Salah satu gejala politisasi agama yang menjadi perhatian publik saat ini adalah gerakan #2019GantiPresiden.²²

Semua hak yang mewabah dari politisasi dan populisme agama yang berbuntut hingga pemilihan presiden 2019 tidak lepas dari narasi-narasi komunikasi kreatif yang dibangun atas dasar bahasa. Bahasa sebagai manifestasi realitas budaya politik kian dapat mengubah persepsi kebijakan politik atas dasar *personal interest*. Kita bisa menyimak bagaimana populisme agama dalam perhelatan politik saat menjelang pemilihan presiden 2019. Begitu panasnya nuansa ideologi yang dibawa oleh masing-masing tokoh yang diusung. Populisme agama dirasa sangat jitu untuk mengelabui persepsi masyarakat agar memilih tokoh yang disepakati ijma ulama. Para kubu yang mengusung calon presiden atas dasar ijma ulama semakin gencar untuk menarasikan bahasa-bahasa persuasif ke masyarakat saat melakukan aksi solidaritas, aksi damai, doa bersama, subuh berjamaah, maupun aksi lain yang mengandung persuasif.

Senerai peristiwa yang menyelimuti politisasi agama di era post-truth demikian turut menjadi keprihatinan publik. Betapa agama menjadi media

²⁰ Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (December 11, 2018): 133, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.

²¹ Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik; Politik Pasca Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 141.

²² Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi."

mitologi, religius yang harus dilegitimasi dengan politik. Adalah hal yang naif. Kekhawatiran publik atas kepemimpinan rezim selama ini hanya sebatas stereotip yang berkembang masif di masyarakat. Seperti kekhawatiran pada variabel-variabel sosial seperti kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial, disorientasi sosial, terciptanya ruang bagi tenaga kerja asing, liberalisme, sekulerisme, dan otoritarianisme. Hal demikian yang tidak terbukti secara valid, sehingga politik agama menjadi agenda besar untuk menunjukkan identitas kebenaran yang membentuk paradigma politik harus didasari agama.

Bahasa dan Politik Islam; Quo Vadis Perhelatan Panggung Kekuasaan di Indonesia

Sebuah paradoks jika eksistensi politik Islam mengesampingkan peran bahasa. Bahasa politik Islam mengindikasikan dedikasi atas agama yang merupakan diskursus yang berkembang sebagai bentuk ekspresi politik Islam.²³ Bahasa sebagai legalitas plural dalam menengahi fenomena sosial telah terbukti semenjak bahasa itu digunakan dalam forum-forum penting di ruang politik, pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.

Sebagian massa yang demonstrasi di gedung KPU dan Bawaslu pada tanggal 22 Mei 2019 sudah lepas kendali dalam kasus pengujian dan etika berbahasa. Demonstrasi saat itu dipicu karena sebagian dari pendukung capres nomor urut dua menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Massa yang bergerak secara masif beramai-ramai melakukan unjuk rasa dan blokade di beberapa titik jalan gedung KPU dan Bawaslu. Berbagai ragam orasi sebagai bentuk kritik terhadap keputusan KPU dan Bawaslu dilantangkan di berbagai sudut.²⁴ Dikuatkan dengan orasi verbal tentang determinasi kegundahan politik, yakni;

“kami segenap rakyat Indonesia, menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU. Rakyat tidak buta, kami ibarat gembala yang dibiarkan tanpa tuan. Kami tidak percaya KPU, Bawaslu, dan Pemerintah. Kami adalah raja di negeri ini. Kami akan melakukan

²³ Ali Riyadi, “BAHASA POLITIK ISLAM DI INDONESIA,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 22, no. 1 (March 3, 2013), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v22i1.59>.

²⁴ Farih Maulana, “Sejumlah Massa Demo Minta Di Depan KPU, Minta Hasil Pemilu Dihormati,” *Detiknews*, 2019.

*tindakan-tindakan anarkis jika pemerintah tidak mendengarkan aksi kami. Kembalikan hak dasar demokrasi pada rakyat. Sebagai lembaga negara, KPU harusnya jujur dalam melakukan rekapitulasi suara pemilu pilpres 2019. Kami tidak mau dibohongi. Kembalikan suara rakyat. Menangkan Prabowo atau kita akan lakukan unjuk rasa terus menerus”.*²⁵

Orasi yang dikemukakan di atas dapat menyandera dan mempengaruhi persepsi masyarakat yang semula percaya dengan KPU menjadi tidak mempercayainya. Orasi-orasi yang lepas dari kesopanan politik (*political correctness*) demikian juga tidak selaras dengan etika berbahasa. Secara normatif, berbahasa memiliki kuasa tindak tutur yang terikat.²⁶ Ragam tindak tutur yang diujarkan harus memiliki *value* terhadap fenomena empirik. Orasi yang dilakukan oleh salah satu massa demonstrasi tersebut juga mengandung kontradiksi semantis, maksudnya ialah, bahwa ajakan untuk tidak mempercayai pemerintah adalah salah satu bentuk sikap rasis terhadap pemerintah. Berbuntut dari sikap rasis inilah yang kemudian masyarakat bersikap diskredit terhadap lembaga pemerintah dan pemerintah. Tindak tutur yang tidak memiliki *value of educations* dalam frame pragmatik dapat merusak pranata sosial dan menimbulkan kegaduhan nasional.

Secara fundamental, orasi yang diujarkan oleh salah satu massa demonstran berusaha merepresentasikan seluruh suara rakyat yang menuntut dasar demokrasi dikembalikan di tangan rakyat secara holistik. Pemerintah adalah eksekutif yang harus tunduk kepada Undang-undang Dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sikap tidak percaya masyarakat kepada KPU dan pemerintah harus dikembalikan sedia kala. Tanpa sadar, orasi dengan sistemasi bahasa demikian akan berbuntut panjang di kemudian hari mulai adanya penangkapan sejumlah provokator yang menyulut sikap anarkis massa, penyiraman gas air oleh aparat kepada massa demonstran, dan aksi saling kejar antara aparat dan massa. Massa tampak terprovokasi dan mulai melakukan pelemparan batu terhadap aparat. Sejumlah pertokoan dan rumah tutup gunaantisipasi terjadinya kerusakan

²⁵ “Politik Islam” (breakingnews, 2019).

²⁶ Louise, *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner*.

berat akibat kerusuhan.²⁷ Hal inilah yang dialami saat itu di depan gedung KPU dan Bawaslu sebagai bentuk akibat dari ujaran bahasa yang bernuansa politis persuasif, provokatif yang mengandung derogasi semantik. Demikianlah salah satu dari contoh bahasa verbal yang digunakan dalam kontestasi politik.

Selain itu, pengkajian lebih lanjut juga ditemui poster-poster dalam media sosial yang mengandung derogasi semantik dan provokatif. Maraknya poster-poster yang muncul dalam sejumlah akun facebook, twitter dan instagram kian meramaikan jagat politik yang sedang hangat. Respon negatif dari derasnya mainstream politik identitas kian mewabah dari dimensi komunikasi verbal kepada komunikasi non-verbal. Tantangan politik di era post-truth. Politik harus diperjuangkan melalui dua dimensi, dimensi empiris dan dimensi virtual. Namun, perhelatan politik dalam dimensi virtual bukanlah *justifiable* yang mutlak. Berikut peneliti sajikan poster-poster dan meme politik yang mengandung derogasi semantik dan provokatif.



Gambar 0.1

Adalah sebuah poster yang menyeru untuk berkumpulnya umat muslim sebagai bentuk solidaritas umat muslim dalam berbagai aksi mulai aksi 212, 414, atau reuni-reuni yang serupa yang digelar oleh alumni kelompok 212. Dalam dunia politik, hal demikian disebut dengan post-truth, yaitu budaya politik dimana perdebatan dibingkai oleh eksploitasi terhadap emosi, dan pengulangan-pengulangan tentang pernyataan tentang suatu maksud dan mengabaikan fakta-fakta yang sesungguhnya.²⁸

²⁷ “Polisi Tegaskan Kericuhan 22 Mei Bukan Rekayasa,” *CNN Indonesia*, 2019.

²⁸ Alimi, *Meditasi Agama Post-Truth*.

Suatu hal yang sangat naif jika poster tersebut dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat awam. Buktinya, seruan *ifthar* (berbuka puasa) yang direncanakan tanggal 21-22 Mei 2019 menuai banyak kontroversi. Peserta yang hadir jelas dibumbui politik dengan label agama, yakni berbuka puasa. Politik dan agama memang menjadi dua termin yang saling menguatkan dan menutupi. Justifikasi politik bisa ditutupi dengan kebenaran agama. Agama sebagai sandaran mitologi dan petunjuk hidup akan lebih mudah mengakomodir perihal yang bernuansa politik. Pada kasus ini, seruan poster untuk *ifthar* dapat menyandera persepsi masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Masyarakat yang demam akan kepemimpinan rezim Jokowi saat ini lebih sensitif untuk melakukan tindakan-tindakan provokatif, mengumpulkan massa, dan melakukan demonstrasi. Alasannya sangat mudah, yakni mereka yang terkontaminasi pikirannya akan berkumpul, bersatu, dan menyerukan kebenaran politik dengan dalih agama. Agama direpresntasikan sebagai kebenaran politik yang harus diamini dan dianut publik tanpa memikirkan sisi yang lain. Misi dari keberadaan kegiatan *ifthar* tersebut tidak lain adalah untuk menumbangkan rezim Jokowi. Dengan balutan dan akomodiriasi kegiatan positif kemudian bermuara pada perihal negatif. Studi bahasa ikonik seperti poster yang dibuat demikian sangat jitu untuk membuat sikap persuasif terhadap masyarakat.



Gambar 0.2

Poster kedua ini adalah seruan untuk bersatu menegakkan kebenaran. Secara semiotis, poster ini merupakan klasifikasi dari ikon, yakni tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi, simulasi, imitasi, atau

persamaan. Sebuah tanda dirancang untuk merepresentasikan sumber acuan melalui simulasi atau persamaan.²⁹ Dalam sisi bahasa politik, poster ini merupakan ikon persuasif untuk komunikasi non-verbalistik. Bahasa-bahasa dengan ragam tindak tutur perlokusi menjadi titik fokus mengajak masyarakat untuk melakukan gelar demonstrasi menolak keberadaan PKI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, orang-orang kafir, pemerintah maupun masyarakat yang munafik. Dengan proses tindak tutur verbalistik dan perlokusi, seorang komunikator atau orator bersikeras untuk mengungkapkan misi pribadi atas kepentingan politik. Stereotip-stereotip negatif mulai dibangun atas dasar kebaikan politik.

Kasusnya hampir sama dengan poster yang pertama. Pada poster yang kedua ini dibuat dengan misi mengumpulkan massa guna melakukan aksi solidaritas, demonstrasi kepada rezim pemerintah saat ini. Seruan dengan jargon “Bersatulah Tegakkan Kebenaran, Lawan PKI, Penista Agama dan Orang Munafik, Muslimin Bersatu Bela Agama dan Negara” dengan ikon tangan mengepal di bawah bendera tauhid adalah representasi untuk menyeru kepada ajaran Islam yang benar di bawah konsep khilafah yang jelas-jelas menolak ideologi PKI. Kelompok rasis yang mengatasnamakan Islam ini juga sangat antipati dengan orang-orang yang memiliki agama dan keyakinan selain Islam. Mereka tidak segan dengan menyebut orang lain yang berbeda faham dengan terminologi kafir dan munafik. Segala perihal yang dilakukan pemerintah saat ini tidak lepas dari bayang-bayang PKI dan orang-orang kafir. Stereotip kelompok ini adalah bahwa segala kebijakan yang dieksekusi pemerintah adalah keberpihakan yang hanya menguntungkan etnis tionghoa dan masyarakat migran. Pemerintah sudah tidak peduli dengan kaum minoritas dan pemeluk Islam. Pemerintah dispekulasikan telah mengebiri demokrasi yang merupakan asas negara. Ajakan untuk aksi solidaritas dan demonstrasi berbuntut panjang dengan misi menumbangkan pemerintah. Lagi-lagi agama dilabel sebagai penutup politik.

Pembahasan lebih kompleks pada akun *twitter* dan *instagram* yang menyematkan tagar #2019 GantiPresiden. Tagar ini menjadi viral di tengah

²⁹ Danesi Marcel, *Pesan, Tanda, Dan Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).

masyarakat. Secara makna diadik, tagar ini merujuk pada pergantian personal jabatan yang disandang seseorang dan presiden yang merujuk pada sistem kelembagaan negara. Kalangan yang menentang aksi tagar menyatakan dengan tegas bahwa ini adalah gerakan inkonstitusional. Sementara kelompok yang mendukung aksi tagar ini punya alibi lain bahwa gerakan semacam ini adalah hal yang lumrah dalam alam demokrasi. Gagasan kelompok pendukung ini menafsirkan tagar dari perspektif yang lebih luas, yaitu triadik, sehingga keduanya tidak bisa bertemu dalam suatu kesepakatan makna.³⁰

Pesan profetik yang dapat peneliti ambil bahwa bahasa yang digunakan dalam tagar tersebut ialah bahasa politik dengan konstruksi persuasif agar masyarakat tidak lagi memilih presiden petahana pada pemilu mendatang. Tagar ini pertama kali diinisiasi oleh Mardani Ali Sera, politikus PKS yang duduk di DPR-RI. PKS merupakan partai yang berafiliasi Islam konservatif. Terlepas dari pro dan kontra terkait penafsiran tagar, tagar tersebut memberikan makna simbolik secara eksplicit tentang rasa tidak puas para kader PKS atas pemerintahan presiden Jokowi. Para kader PKS bersikeras mengkampanyekan tagar tersebut dalam dunia virtual. Media sosial yang eksis digunakan adalah instagram. Warganet yang pro dengan narasi demikian dianjurkan untuk menyertakan tagar tersebut di bawah postingan foto dan caption Instagram. Misinya sangat jelas, bahwa saat ini para kader PKS memberikan stereotip kepada presiden Jokowi yang anti Islam. Presiden lebih mementingkan kebijakan-kebijakan sentral daripada kebijakan yang langsung menyentuh rakyat. Presiden telah melakukan diskriminasi terhadap umat muslim yang telah melakukan gerakan massa yang turun ke jalan dan melakukan demonstrasi.

Aksi lain yang masih mengarah pada politisasi bahasa dan politisasi agama ialah gerakan “subuh berjamaah”. Sebagaimana yang dilansir oleh detiknews pada 02 Desember 2018;

“Massa peserta [Reuni 212](#) melaksanakan salat subuh berjamaah. Sejumlah tokoh yang hadir juga ikut menunaikan salat subuh di Monas, Jakarta Pusat. Pantauan detikcom di lokasi, Minggu

³⁰ Wildan, “Tagar #2019GantiPresiden; Suatu Tinjauan Makna Diadik Dan Tradik,” *Didaktika* 1, no. 1 (2018).

(2/12/2018), para peserta aksi langsung melaksanakan salat subuh sesuai menunaikan salat sunah rawatib. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso ikut menunaikan salat berjemaah dengan khusyuk bersama massa. "Seluruh jemaah agar berdoa untuk kejayaan bangsa Indonesia dan untuk keselamatan bangsa Indonesia agar bangsa ini terhindar azab dan diridai pemimpin yang beriman, bertakwa, pemimpin yang adil, serta betul-betul membela islam dan kepentingan umat Islam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama," ucap orator memakai pengeras suara di atas panggung. Reuni 212 diselenggarakan sejak pukul 03.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Salah satu acaranya adalah pengibaran bendera tauhid warna-warni dan bendera Merah Putih. (zap/dkp)"³¹

Kutipan warta di atas menunjukkan eksistensi alumni 212 sedang melangsungkan gerakan subuh berjemaah untuk menarik simpati masyarakat yang haus agama. Para tokoh inti dan petinggi dalam organisasi tersebut juga turut hadir. Tampak petinggi partai politik PAN, PKS, serta pengurus BPN Prabowo-Sandi. Hadirnya mereka dapat menjadi magnet bagi masyarakat untuk mengikuti gerakan tersebut. Gerakan subuh berjemaah merupakan aksi solidaritas publik guna melakukan salat subuh berjemaah dan dilanjut dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, dan agar negeri ini diberi pemimpin yang adil dan diridai Allah Swt. Aksi ini memang menarik diikuti masyarakat awam dan para oposisi. Terlebih dikemas dengan nuansa agama. Seakan agama melegitimasi aksi demikian. Agama hadir di ruang publik untuk merespon oposisi binner paradigma alumni 212.

Aksi demikian erat intervensinya dengan populisme bahasa. Para petinggi dan penggerak aksi subuh berjemaah ialah mereka yang memiliki keterampilan komunikasi baik serta memiliki posisi penentu kebijakan publik. Ketika bahasa diujarkan oleh para pemangku kebijakan, maka dengan mudah memberikan persepsi kepada masyarakat. Terlebih konten bahasa menyangkut kesejahteraan masyarakat. Tentu menjadi magnet masyarakat. Bahasa-bahasa persuasif yang

³¹ Farih Maulana, "Massa Reuni 212 Dan Sejumlah Tokoh Salat Subuh Berjemaah Di Monas," *Deticnews*, 2019.

diujarkan pemangku kebijakan ibarat narasi yang membuat nyaman masyarakat yang menimbulkan daya tarik untuk diikuti.

Sama halnya dengan bahasa agama. Aksi subuh berjamaah yang dilakukan oleh alumni 212 demikian tidak lepas dari hubungan bahasa, agama, dan politik. Bahasa verbal yang diujarkan oleh para petinggi ormas pada aksi tersebut menggunakan bahasa religius dan mitologi yang mengarah pada legitimasi agama non profan. Esensi agama dan politik dengan bahasa persuasif akan membentuk sistem komunikasi perlokusi yang mengarah pada pembuktian kebenaran agama. Intervensi agama pada politik aksi ini tercatat menjadi sebuah kebenaran politik identitas. Politik identitas dengan narasi bahasa persuasif untuk mengubah persepsi masyarakat. Terbukti pada aksi ini dihadiri oleh ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat oposisi dengan misi akhir mengganti presiden pada periode berikutnya.

Dari contoh-contoh demikian dapat diambil sebuah sintesa bahwa politik dan agama erat kaitannya dengan bahasa. Tiga term ini bersinergi secara vertikal guna membentuk opini publik yang memiliki delegitimasi empiris-fenomenologis. Posisi bahasa pada tahap ini tidak memiliki empowerment kepada komunikan untuk menunjukkan eksistensi komunikasi. Bahasa kreatif yang didesain sedemikian rupa akan menjadi penguat jati diri komunikator untuk keberlangsungan politik bahasa. Akibatnya melemahnya sikap bahasa. Perihal lain yang masih memiliki kaitan erat dengan propaganda ini ialah bahwa bahasa dilahirkan untuk meraih politik identitas dan dikuatkan dengan populisme agama. Secara hakikat nilai bahasa pada pose ini menjadi kuat, karena menjadi legitimasi empiris yang tidak perlu dibantah. Dengan sandaran mitologi agama, bahasa akan tumbuh dan memiliki prestise register yang tinggi. Kedua hal ini yang kemudian terjatuh pada bilik positif dan negatif yang tidak mengarah pada kebenaran bahasa secara faktual.

Berbincang mengenai prestise bahasa. Contoh-contoh yang telah peneliti tampilkan di atas merupakan fenomena realistik posisi bahasa dalam pergulatan politik menjelang pesta demokrasi elektoral 2019 di Indonesia. Betapa bahasa menjadi *keyword* yang harus senantiasa diperhatikan untuk menunjukkan jati diri

ormas, golongan, dan partai tertentu. Prestise bahasa yang menuai distingsi secara absolut hadir dalam perheletan politik yang kian hangat, sehingga bahasa tidak memiliki *positive value* pada kontestasi tersebut. Bahasa lebih banyak digunakan pada perihal negatif-konjungtif yang mengarah pada kegaduhan akibat isu pada opini publik.

Apa yang harus dilakukan saat memasuki peristiwa ini, dimana bahasa menjadi media penentu keberhasilan politik identitas? Tentu sangat tidak arif. Bahasa memiliki akuisisi sosial yang martabatnya harus dijaga. Bahasa ialah media kreatif yang digunakan untuk berperilaku positif. Seperti terpenuhinya maksim-maksim kualitas dan kuantitas saat berkomunikasi. Selain itu *style* bahasa yang dinarasikan harus memenuhi standar komunikasi, yakni harus mempertimbangkan dampak, pengaruh, serta efek komunikasi berikutnya. Apakah bahasa akan menjadi jembatan transmisi perubahan sosial yang positif atau sebaliknya. Semua tergantung pada masyarakat tutur (*speech community*) yang menggunakannya.

Sikap lain yang harus diperhatikan guna merespon isu politik demikian ialah penggunaan bahasa dalam menunjang komunikasi kreatif dan positif. Seperti terciptanya kanal-kanal media sosial dengan narasi bahasa positif. Perihal demikian lebih baik daripada berkuat pada diskreditasi ormas dan golongan tertentu. Persaingan secara positif tidak akan menjadi bias yang menimbulkan propaganda. Bahasa merupakan produk kearifan lokal yang harus bersinggungan dengan fenomena sosial. Maka dari itu tentu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan komunikasi sosial yakni dengan mendistorsi sisi negatif berbahasa.

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Gerak Politisasi Islam Pihak Oposisi

Adanya fenomena-fenomena gerak politisasi Islam menjelang pesta demokrasi 2019 di Indonesia diwarnai sangat beragam. Faktor internal tidak dapat lepas dari akar keilmuan yang diungkapkan M. Natsir bahwa relasi Islam dan negara adalah keniscayaan yang diselenggarakan di Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan asas syariah.³² Perihal ini kemudian membawa dampak pada perlunya agama Islam menjadi agama yang superior dan

³² Mohammad Natsir, "Islam Sebagai Dasar Negara," 2000.

menjadi panutan warga masyarakat untuk menempatkan Islam sebagai dasar negara. Istilah ini berkembang dengan populisme agama. Agama sebagai hegemoni politik akan mendapat porsi yang lebih dibanding demokrasi marhaenisme. Ini adalah faktor terbesar yang melatarbelakangi politisasi Islam di Indonesia pada tahun 2019. Populisme agama dilakukan kalangan fundamentalis karena faktor sentimen atas etnis dan agama. Gerakan ini berkembang pada wacana-wacana dan penggunaan bahasa verbal populis dan argumentatif yang mengarah pada informasi-informasi distorsif untuk kepentingan politik.³³ Sehingga upaya ini menjadi cermin politisasi Islam yang berkembang di Indonesia pada tahun 2019. Wacana ini terus melebar pada sistem politik identitas. Para partisipan saling berebut suara muslim dalam pemilu 2019 dan tidak bisa lepas dari politisasi identitas dan agama. Isu yang oleh sebagian umat Islam dianggap merugikan demokrasi kaum reformis pada akhirnya melahirkan gerakan *ijtima' ulama* guna mengusung capres-cawapres pilihan mereka guna menantang petahana.³⁴

Faktor yang melatarbelakangi munculnya gerak politisasi Islam pihak oposisi adalah ketidakpuasan atas pemerintahan yang dipimpin oleh petahana dengan partai pengusung PDI-P memberikan stereotip bahwa partai PDI-P adalah partai yang menganut paham marhaenisme dan liberalisme, sehingga dalam penentuan-penentuan kebijakan yang dicanangkan pemerintah dianggap mendiskreditkan Islam.³⁵ Dengan kerangka berpikir marhaenisme dalam menjalani estafet politik di Indonesia, partai PDI-P menjadi sorotan bagi kalangan fundamentalis, yakni ormas-ormas yang bernuansa Islam di Indonesia. Kalangan fundamentalis yang pada tahap ini menempati oposisi bersikeras menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi syariah. Distingsi kaum fundamentalis bahwasanya Indonesia sebagai penduduk yang memiliki jumlah

³³ Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi."

³⁴ R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (June 28, 2019): 69, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.

³⁵ Geraldy, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS."

warga muslim terbesar di dunina harus senantiasa berdemokrasi dan berasas Islam. Pemimpin yang dipilih harus tepat dan menjalani syariah Islam.

Bahasa-Komunikasi; Resolusi Konflik Kasuistik Politik Islam 2019

Sebagai masyarakat demokrasi yang memiliki kebebasan individu untuk menentukan dan memilih pemimpin, kini sudah saatnya untuk memulai bersikap bijak dan arif disaat menghadapi kompleksitas permasalahan politik, terlebih jika dirasa didapati politik identitas. Terjadinya ketegangan sosial dan panasnya suhu politik Indonesia di tahun 2019 tidak lepas dari akar sejarah reformasi 1998, yakni masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan segala hal yang dikehendaknya selagi masih dalam lingkup undang-undang. Kemudian, menyulutnya suhu politik disaat pemilihan presiden atau setelah presiden seperti kasus-kasus yang dijelaskan sebelumnya adalah tidak lepas dari propaganda bahasa yang digunakan. Bahasa-bahasa komunikasi politik yang diujarkan oleh elit politik tertentu jelas menyulut kehangatan suhu politik dan berhasil mengelabui persepsi masyarakat awam. Masyarakat tidak membutuhkan lagi nuansa kebenaran politik yang abstrak seperti yang dijanjikan oleh para elit politik. Pada masa ini, masyarakat lebih mudah terprovokasi dengan naras-narasi bahasa kreatif yang mengandung derogasi semantik, sehingga yang muncul adalah perpecahan dan perseteruan anak bangsa yang berdasar pada perbedaan pilihan politik dan calon yang diusung.

Menyikapi hal demikian, agar nilai politik bisa diterima dan dilaksanakan masyarakat didapati solusi-solusi yang sekiranya dapat meredam suhu panasnya politik terutama pasca pemilihan presiden, yakni; 1). Pihak pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi dan hukum bagi masyarakat yang melanggar kode etik politik tanpa adanya diskriminasi baik dari kubu petahana dan oposisi. Pemerintah harus senantiasa bersikap fleksibel dalam menangani kasuistik hukum politik. 2). Gunakan bahasa-bahasa positif untuk menarik simpati masyarakat. 3). Masyarakat perlu mencari bukti sebelum meyakini berita-berita negatif, sehingga ideologi masyarakat tidak mudah tersandera karena kepentingan kelompok tertentu.

Hal demikian kiranya dapat meredam kasuistik politik 2019 di Indonesia agar tidak terjadi lagi perpecahan dan pertikaian anak bangsa karena sebab perbedaan pandangan politik dan calon pemimpin. Masyarakat harus lebih pandai dalam menemukan resolusi konflik dalam batang tubuh politik. Selain itu, masyarakat harus merevitalisasi edukasi politik agar nuansa politik dapat dirasakan bersama, tidak serta-merta atas dasar kepentingan pribadi, namun atas dasar kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial.

PENUTUP

Bahasa sebagai salah satu produk budaya dan kearifan masyarakat lingual harus mampu berdialektika dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sains, dan teknologi. Di era ini, bahasa bukan lagi sebagai disiplin ilmu yang interdisipliner, cakupannya harus bersinggungan dengan disiplin ilmu yang multidisipliner terutama ilmu politik.

Bahasa dan pergulatan politik Islam di Indonesia menjelang pesta demokrasi 2019 sangat menentukan keberhasilan politik. Derivasi bahasa dengan berbagai tindak tuturnya dalam dimensi verbal dan non-verbal kian meramaikan kontestasi politik 2019 di negeri ini. Bahasa digunakan sebagai media kreatif untuk keberlangsungan kepentingan pribadi atas dasar politik, yakni dengan munculnya berbagai narasi-narasi kreatif politik yang memiliki nilai negatif dan provokatif seperti komunikasi verbal disaat keberlangsungan kampanye, mobilisasi massa, aksi solidaritas, aksi damai, subuh berjamaah, dan doa bersama. Selain itu narasi komunikasi non-verbal diaktualisasikan dengan maraknya narasi-narasi dan poster-poster bernilai negatif dalam media sosial. Hal ini yang dapat mengundang provokasi dan menyandera persepsi masyarakat untuk bereaksi sikap negatif. Ideologi masyarakat mudah dipengaruhi oleh figur komunikator yang merepresentasikan kebenaran politik, sehingga yang didapat adalah politik post-truth, bukan lagi kebijakan politik yang humanis.

Resolusi dari kasuistik pergulatan bahasa dan politik 2019 di Indonesia dapat dbijaki dengan sikap pemerintah yang harus tegas dalam menjalankan hukum tanpa adanya diskriminasi. Masyarakat harus berhati-hati dalam berbahasa di saat tahun politik. Sikap yang tidak gagap dan selalu menerbar kebaikan bahasa

politik seideal mungkin. Masyarakat juga harus mampu menyaring narasi-narasi negatif terkait politik sebelum ditindaklanjuti lebih jauh. Mampu menyaring berita-berita hoaks yang dapat memicu pertikaian masyarakat sehingga dapat diciptakan moderasi kehidupan yang humanis.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimi, Yasir. *Meditasi Agama Post-Truth*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Anang, Santoso. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003.
- Andawiyah, Rofiatull. "Bahasa, Komunikasi Politik Dan Ideologi." *OKARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 10, no. 2 (November 30, 2016): 159. <https://doi.org/10.19105/ojbs.v10i2.1086>.
- Fahrurrozi. *Bahasa Indonesia; Catatan Mengenai Kebijakan Bahasa, Kaidah Ejaan, Pembelajaran Sastra, Penerjemahan, Dan BIPA*. Yogyakarta: Garudawacana, 2016.
- Gerald, Galang. "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019): 135–57.
- Heriyanto, Gun gun. *Panggung Politik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik; Politik Pasca Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 141.
- . "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (December 11, 2018): 133. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.
- Louise, Cummings. *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Marcel, Danesi. *Pesan, Tanda, Dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Maulana, Farih. "Massa Reuni 212 Dan Sejumlah Tokoh Salat Subuh Berjamaah Di Monas." *Deticnews*, 2019.
- . "Sejumlah Massa Demo Minta Di Depan KPU, Minta Hasil Pemilu

- Dihormati.” *Detiknews*, 2019.
- Natsir, Mohammad. “Islam Sebagai Dasar Negara,” 2000.
- “Polisi Tegaskan Kericuhan 22 Mei Bukan Rekayasa.” *CNN Indonesia*, 2019.
- “Politik Islam.” *breakingnews*, 2019.
- Purnomo, Maslathif. “Politik Bahasa Di Tengah Kemajemukan Masyarakat,” 2019. <https://pakarlinguistik.wordpress.com/2010/03/10/politik-bahasa-ditengah-kemajemukan-budaya-bangsa/>.
- Putra, Wahyu Hanafi, and Dawam M Rohmatulloh. “Bahasa Dan Narasi Politik Kreatif; Kontestasi Merebut Kebenaran Islam Dalam Demokrasi Digital 2019 Di Indonesia.” In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3:294–302, 2019.
- Putra, Wahyu Hanafi, and Rizki Amalia Sholihah. “Politik Bahasa Asing Dan Hegemoni Pesantren Di Nusantara.” *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 1, no. 1 (April 4, 2020): 43–53. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v1i1.320>.
- Rabiah, Sitti. “Ragam Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Politik.” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2017): 121–31.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Riyadi, Ali. “Bahasa Politik Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 22, no. 1 (March 3, 2013). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v22i1.59>.
- Rosyid, Moh. “Kekuatan Makna Bahasa Dalam Politik Konspirasi.” *Arabia* 6, no. 1 (2014).
- Saputro, Agus. “AGAMA DAN NEGARA : POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019.” *ASKETIK* 2, no. 2 (December 25, 2018): 111–20. <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>.
- Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (October 9, 2018): 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Thomas L, Wareing S. *Bahasa, Masyarakat, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wildan. “Tagar #2019 Ganti Presiden; Suatu Tinjauan Makna Diadik Dan Tradik.” *Didaktika* 1, no. 1 (2018).

Zuhro, R Siti. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (June 28, 2019): 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.